

**WALI KOTA MADIUN**

**SALINAN**

PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 13  
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL  
AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan efisiensi, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat administrasi, dalam memberikan bantuan sosial air bersih kepada keluarga penerima manfaat, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Air Bersih dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Air Bersih;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
13. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Air Bersih (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 13/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL AIR BERSIH.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Air Bersih (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 13/G) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Penyaluran bantuan sosial air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara non tunai kepada penerima bantuan sosial yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Penerima bantuan merupakan keluarga yang ada di DTKS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. jika status bangunan tempat tinggal yang ditempati merupakan milik pribadi, nama penerima harus sama dengan nama yang terdaftar pada identitas pelanggan;
  - b. jika status bangunan tempat tinggal yang ditempati merupakan milik orang tua atau keluarga, nama penerima boleh tidak sama dengan nama yang terdaftar pada identitas pelanggan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan dari Kelurahan; dan/atau
  - c. jika status bangunan tempat tinggal yang ditempati merupakan milik orang lain yang disewa atau dikontrak, nama penerima boleh tidak sama dengan nama yang terdaftar pada identitas pelanggan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan.
- (3) Besaran bantuan sosial air bersih diberikan sesuai dengan Standar Kebutuhan Pokok Air Minum yang telah ditetapkan oleh PDAM.
- (4) Jumlah penerima dan lokasi bantuan sosial dari setiap penyaluran bantuan sosial ditetapkan oleh Dinas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 19 Maret 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

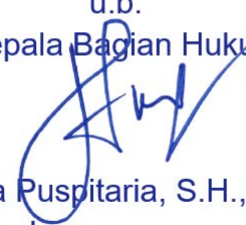
Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 19 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2024 NOMOR 9/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Wali Kota Madiun  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum  
  
Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina  
NIP 198212132006042009